

ABSTRAK

Desa Tajungan termasuk desa yang menjadi sasaran pemberdayaan Provinsi Jawa Timur melalui Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dan mendirikan Usaha (UMKM) baru atau meningkatkan UMKM yang ada di desa atau kelurahan. Persoalannya, tidak semua masyarakat atau pelaku usaha yang sangat miskin yang berada di Desa Tajungan itu menerima bantuan program BRTSM tersebut. Dari 319 orang pelaku UMKM yang sangat miskin, ternyata hanya 29 orang (9 persen) yang menerima bantuan tersebut. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian apakah pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) melalui program BRTSM di Desa Tajungan Kecamatan Kamal itu sudah sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 dan apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan melalui program BRTSM di Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *socio legal reseach* dengan menggunakan pendekatan fakta dan data yang diperoleh kemudian dibahas dan dianalisis secara deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) di Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui jalin matra bantuan rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tidak selaras dengan Pasal 2 huruf (h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 jo. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut adalah tidak adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah, sehingga pemberdayaan yang dilakukan melalui pemberian bantuan RTSM itu tidak selaras dengan tujuan dan sasaran program pemberdayaan. Padahal berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 31 A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, bahwa pendampingan itu merupakan bagian dari program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pelaksanaannya bisa dilakukan secara berjenjang bersama-sama dengan Kabupaten/Kota. Akibat tidak adanya pendampingan maka masyarakat atau pelaku UMKM tidak bisa memanfaatkan fasilitas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci :Pemberdayaan, UMKM, Bantuan RTSM

ABSTRACT

The Tajungan village includes a village targeting the funding of the eastern Jawa Province through the Motorways Program for Very Poor Houses Assistance (BRTSM) aimed at helping the community to undertake business activities and to establish a new endeavour (UMKM) or to increase the UMKM in the village or in deprivation. The question is, not all the very poor people or entrepreneurs in the Tajungan village receive the help of the BRTSM program. Of the 319 very poor UMKM offenders, only 29 (9%) received the aid. In this connection, we need to do research on whether the micro, small, corporate finance implementation Half (UMKM) through the BRTSM programme in Kamal District Village has been in line with the loss of Eastern Guard Province No. 8 in 2015 and anything that has become a slave to independence through the BRTSM programme in Kamal District Village District Capital Base.

This research is an empirical legal research or socio legal research using a factual approach and the data obtained are then discussed and analyzed descriptively, by describing and explaining the data obtained by providing a comprehensive picture of the implementation of empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through The Very Poor Household Aid Matra Program (BRTSM) in Tajungan Village, Kamal District, Bangkalan Regency.

The results of the study indicate that the implementation of empowering micro, small and medium enterprises (MSMEs) through the establishment of a very poor household assistance (RTSM) dimension in Tajungan Village, Kamal District, Bangkalan Regency is not in line with Article 2 letter (h) of Regional Regulation of East Java Province Number 8 of 2015 jo. Regional Regulation of East Java Province Number 13 of 2013 concerning Empowerment of Village and Sub-District Communities and Governor Regulation Number 5 of 2018 jo. Governor's Regulation Number 8 of 2019 concerning General Guidelines for the Other Road Program Towards Independent and Prosperous East Java Province. The inhibiting factor in the implementation of empowerment is the absence of assistance from the Regional Government, so that empowerment carried out through the provision of RTSM assistance is not in line with the goals and objectives of the empowerment program. Whereas based on Article 19 in conjunction with Article 31 A Regional Regulation of East Java Province Number 8 of 2015 in conjunction with Regional Regulation of East Java Province Number 13 of 2013 concerning Empowerment of Village and Sub-District Communities, that assistance is part of the community economic business empowerment program and its implementation can be carried out independently. tiered together with the Regency/City. Due to the absence of assistance, the community or MSME actors cannot take advantage of the assistance facilities provided by the East Java Provincial Government that the assistance is part of the community economic business empowerment program and its implementation can be carried out in stages together with the Regency/City. Due to the absence of assistance, the community or MSME actors cannot take advantage of the assistance facilities provided by the East Java Provincial Government that the assistance is part of the community economic business empowerment program and its implementation can be carried out in stages together with the Regency/City. Due to the.

Keywords: Empowerment, UMKM, RTSM Assistance